

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab II ini terdiri dari landasan teori, kerangka konseptual penelitian dan pengembangan hipotesis. Landasan teori membahas tentang teori dasar yang digunakan yaitu teori kelembagaan. kerangka konseptual yang memberikan gambaran logika berfikir atas dasar teori yang digunakan. Terakhir, pengembangan hipotesis membahas tentang dasar penyusunan hipotesis yang berasal dari teori, penelitian terdahulu serta penjelasan yang relevan dengan hipotesis yang diusulkan.

2.1 Teori Kelembagaan (*Institusional Theory*)

Teori kelembagaan merupakan salah satu landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Teori institusional atau kelembagaan menjelaskan bahwa norma institusional membentuk sifat kegiatan ekonomi yang kuat, karena dapat mengatur dan memotivasi perilaku dalam lingkungan tertentu (Lau *et al.*, 2002; Scott, 2013; Utara, 1990). Sebagai institusional mengatur dan menentukan batas-batas serta jalan untuk berperilaku tegas dalam lingkungan tertentu, menghasilkan hambatan masuk atau menciptakan peluang untuk tindakan dan kinerja (Bruton *et al.*, 2010; Fligstein, 1996; Grewal & Dharwadkar, 2002; Utara, 1990). Syahyuti (2007:2) menyatakan bahwa kelembagaan memiliki inti kajian kepada perilaku dengan nilai, norma dan aturan yang mengikuti dibelakangnya. Dari pendapat diatas, nilai dan norma serta aturan merupakan syarat utama dalam lembaga untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang mengikat pada kelembagaan tersebut. Arsyad (2010:11) menyatakan

bahwa institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan (*constraints*) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal (misalnya: peraturan-peraturan, undang-undang, konstitusi) dan aturan - aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut.

Salah satu lembaga yang melakukan pemberdayaan UMKM yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang merupakan kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara pasal 552, 553 dan 554, yaitu: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan demikian, perspektif institusional digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana lingkungan kelembagaan yang tertanam dalam UMKM mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya.

2.2 Kinerja Usaha Mikro, Kecil & Menengah

Menurut Mutegi *et al.* (2017) kinerja merupakan hasil atau evaluasi kerja perusahaan yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dengan pembagian kegiatan berupa tugas dan perannya pada periode tertentu dengan standar dari perusahaan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan menciptakan lapangan kerja,

meningkatkan daya saing bisnis, menyediakan konsumen dengan berbagai produk layanan inovatif (Chisanga *et al.*, 2020) dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional serta merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (Cheong *et al.*, 2020).

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang di capai oleh seorang individu atau kelompok pada suatu periode tertentu, dan akan dihubungkan dengan ukuran nilai atau standard dari perusahaan (Aribawa 2016). Kinerja Usaha mikro kecil merupakan salah satu sasaran yang paling penting dari manajemen keuangan, salah satu tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemilik selain memaksimalkan nilai perusahaan (Husnan & Pudjiastuti, 2015). Kinerja bisnis amat penting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan dari sebuah bisnis. Umumnya pada tahap pembentukan atau pendirian, sebuah bisnis sangat mungkin tidak menguntungkan karena investasi dan biaya untuk mendirikan atau memulai bisnis. Namun ketika bisnis mulai berkembang, keuntungan sudah harus dihasilkan.

Wawerau & Ngugi (2014, 1-20) menyarankan bahwa perusahaan kecil butuh konsentrasi pada kinerja, responden setuju bahwa dengan laporan laba tersebut sangat penting karena itu dibutuhkan untuk kelangsungan bisnis karena itu mempengaruhi kinerja usaha mikro kecil. Kinerja keuangan dengan menggunakan tolok ukur laba sangat penting karena dipahami bahwa laba merupakan daya tarik bagi investor/pemodal untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan atau bisnis, laba merupakan salah satu ukuran keberhasilan pengelola atau pemilik dalam mengelola sumberdaya yang terbatas untuk memperoleh hasil tertentu. Laba juga merupakan

faktor penentu kelangsungan hidup bisnis, dan dapat menjadi motivator bagi pemilik dan pengelola guna meningkatkan kinerja usaha di masa datang (Jati H, 2017).

2.3 Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah merupakan faktor eksternal dalam membangun usaha. Sehingga dukungan pemerintah memainkan peran penting dalam mempengaruhi UMKM salah satunya dengan meningkatkan akses ke sumber daya dan membentuk bagaimana UMKM merespons lingkungan yang kompetitif dan dinamis (Smallbone & Welter, 2001 ; Tambunan, 2008 ; Lu *et al.* , 2010; Kang & Park, 2012 ; Thongsri & Chang, 2019). Dukungan pemerintah merupakan bentuk kebijakan pengembangan sektor UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang semakin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatkan daya saing pengusaha nasional di pasar internasional serta seimbangnnya penyebaran investasi antar sektor dan antar golongan (Abdul Rosyid, 2014).

Keterlibatan pemerintah yang lainnya diterapkan dan diatur dengan jelas dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-undang ini memuat ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi pemberayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana. Kerjasama pemerintah

dengan bantuan Departemen Koperasi yang menaungi dan mengatur segala pergerakan dan perkembangan kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah, dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN yang merupakan institusi keuangan baik bank maupun non bank. Dalam upayanya mewujudkan UMKM menjadi lebih mandiri serta dapat berkembang mewujudkan pemerataan perekonomian negara khususnya di kalangan masyarakat kecil dan menengah. Adapun bantuan yang telah diterapkan oleh pihak pemerintah sebagai wujud dukungan pengembangan UMKM ini berupa bantuan pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik.

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar.

Fenomena yang terjadi akibat Covid-19, berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan UKM kepada 195.099 UMKM ditemukan bahwa 23,10% UMKM

mengalami penurunan omzet usaha, 19,50% UMKM terhambat distribusi, dan 19,45% UMKM mengalami kendala permodalan. Lalu, hasil survei ADB juga menunjukkan kondisi yang sama yaitu 30,5% UMKM di Indonesia menghadapi penurunan permintaan domestik dan 48,6% UMKM tutup sementara. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021 sebesar Rp699,43 triliun. Khusus untuk dukungan terhadap UMKM, telah dialokasikan anggaran PEN sebesar Rp184,83 triliun. pemerintah memberikan prioritas kepada pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional. UMKM berkontribusi 61,1% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97% dari total angkatan kerja atau 116,9 juta tenaga kerja. Dukungan UMKM dan pembiayaan Korporasi diberikan melalui enam stimulus, yaitu Subsidi Bunga UMKM, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana pada Bank Umum, Insentif Pajak, dan Restrukturisasi Kredit. (www.kemenkeu.go.id)

2.4 Kerjasama Antar Perusahaan

Kerjasama antar perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan terlibat dalam upaya kolaboratif dengan perusahaan lain, termasuk pesaingnya, dan untuk menyatukan sumber daya dan kemampuan dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama individu atau kelompok (Levy *et al.* , 2003; Gnyawali & Taman, 2009 ; Kang & Park, 2012). Perusahaan yang menjalani hubungan kerjasama antar perusahaan mampu menuai berbagai manfaat seperti pembagian biaya dan risiko, akses ke berbagai keterampilan, pengetahuan, sumber daya dan kemampuan dalam berbagai aktivitas

rantai nilai untuk meningkatkan kinerja (Lorenzoni & Lipparini, 1999; Dries & Swinnen, 2010; Bouncken & Kraus, 2013; Wang *et al.* , 2015).

Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa kolaborasi mungkin berbahaya bagi kelangsungan hidup UMKM. Misalnya, Gnyawali & Park (2009) berpendapat bahwa sementara kerjasama antar perusahaan dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan skala ekonomi, mengurangi ketidakpastian dan risiko pasar, dan mempercepat masuknya pasar produk baru, risiko pencurian teknologi, tantangan manajemen dalam ketidaksesuaian gaya dan hilangnya kontrol dan fokus perusahaan dapat merugikan UMKM untuk bekerja sama dengan pesaing. Colombo *et al.*(2015) juga berpendapat bahwa kerjasama dengan perusahaan lain menimbulkan banyak tantangan organisasi dan manajerial untuk UMKM seperti mengalihkan sumber daya yang terbatas dan waktu manajemen dari bisnis inti perusahaan.

Meskipun ada perbedaan tentang apakah kerjasama antar perusahaan dapat meningkatkan atau merusak kinerja, teori RBV menyarankan hubungan dengan perusahaan lain sebagai sumber daya yang unik, langka dan tak ada bandingannya. Sehingga perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan lain lebih mungkin untuk mendapatkan persaingan yang berkelanjutan dan kinerja yang unggul dari pada pesaing yang mempraktikkan kolaborasi terbatas (Barney,2001). Melalui kerjasama dengan perusahaan lain, pelaku UMKM dapat memperoleh akses ke sumber daya yang tidak bergerak, bukan mudah dibeli atau dijual di pasar.

2.5 Sumber Daya Manusia (*Human Capital*)

Modal manusia, yang didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan produktif yang dimiliki karyawan telah diidentifikasi sebagai pendorong utama kinerja perusahaan. Penelitian Mubarik *et al.*(2020) mengakui sumber daya manusia sebagai sumber keunggulan kompetitif. Namun demikian, sebagian besar studi mempertimbangkan modal manusia sebagai konstruksi tunggal, dengan hanya mempertimbangkan dimensi spesifik dari modal manusia. Elemen yang berbeda dari sumber daya manusia mungkin memang relatif lebih penting untuk beberapa aspek kinerja perusahaan. modal manusia mempengaruhi kinerja perusahaan, secara langsung dan tidak langsung. Modal manusia meningkatkan kapasitas perusahaan untuk menyerap pengetahuan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (Wernerfelt, 1984 ; Lund Vinding, 2006 ; Ahmed *et al.* , 2019).

Kapasitas daya serap mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghargai, mengasimilasi, dan mengeksplorasi pengetahuan baru serta eksternal untuk mengaplikasikan kepada penggunaan komersial (Cohen & Levinthal, 1990; Flatten *et al.* , 2011). Investasi dalam sumber daya manusia khusus perusahaan penting untuk pembelajaran. Begitu juga yang dialami karyawan yang berpendidikan cenderung dapat meningkatkan pengetahuan. Oleh karena itu, sumber daya manusia memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan kapasitas untuk mengumpulkan, mengembangkan, dan mentransfer pengetahuan yang baru sehingga dapat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

2.6 Akses Kredit

Penerima kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu tertentu (Kasmir 2014). Menurut UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ketidakmampuan UMKM untuk menghasilkan arus kas yang stabil atau menghasilkan agunan bernilai tinggi meningkatkannya risiko kredit yang mengakibatkan biaya pembiayaan lebih besar. Sebuah studi terbaru oleh Chaudhuri *et al.* (2018) juga berpendapat bahwa akses kredit merupakan faktor penentu utama dalam pertumbuhan UMKM. Alberto & Peñaloza (2015) mengatakan faktor penentu akses kredit untuk UMKM yaitu ukuran perusahaan, perusahaan yang mempunyai laba tinggi dan pengumpulan modalnya tinggi menunjukkan kemampuannya dalam mengatur arus modalnya karena mereka dapat dengan mudah menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembalikannya, usia perusahaan juga mempengaruhi faktor penentu akses kredit, semakin lama perusahaan itu berdiri maka arus kas yang didapatkan terlihat lebih baik jadi kemungkinan bisa memperoleh kredit. Jumlah kredit adalah jumlah pinjaman dan periode diterapkan untuk digunakan sebagai modal kerja tambahan untuk unit produksi berbasis pada penilaian kapasitas produksi dan kebutuhan modal kerja (Kasmir, 2004).

Pemerintah meningkatkan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan peminjaman kredit bagi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Oleh karena itu, tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, berarti UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana (www.kur.ekon.go.id/).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM

individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum *bankable*.

Akibat ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada bulan Maret 2020, menjadi suatu tantangan tersendiri untuk dapat menyalurkan KUR secara tepat dan cepat di tengah kebutuhan pembiayaan UMKM yang masih sangat tinggi. Dalam hal relaksasi KUR, berdasarkan data di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi pelaksanaan kebijakan KUR pada masa pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2020 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 7,02 juta debitur dengan baki debit Rp186,5 Triliun. (Realisasi anggaran sebesar Rp4,91 Triliun);
2. Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debit Rp48,18 Triliun;
3. Relaksasi KUR, berupa:
 - Perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debit Rp47,31 Triliun.
 - Penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 16 debitur dengan baki debit Rp2,49 Miliar.

Kemudian pelaksanaan kebijakan KUR sesuai dengan Permenko Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2020, mengatur bahwa untuk perluasan penyaluran KUR kepada pekerja terkena pemutusan hubungan kerja dan kelompok ibu rumah tangga telah dikeluarkan skema KUR baru yakni KUR Super Mikro.

Pada tahun 2021, Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan Permenko Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenko 3 Tahun 2021 tentang Perlakuan Khusus KUR di masa Pandemi Covid-19, Komite Kebijakan bagi Pembiayaan UMKM sebagai pengambil keputusan menetapkan akumulasi plafon pinjaman menjadi Rp 253 Triliun dari yang seharusnya hanya Rp 220 Triliun dan memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga/margin kepada debitur KUR yang terdampak usahanya sampai dengan 31 Desember 2021. Kebijakan penundaan angsuran pokok dan pemberian relaksasi berupa perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon juga tetap diberikan kepada debitur.

Kemudian sesuai dengan arahan presiden tentang peningkatan porsi kredit UMKM menjadi 30 persen hingga tahun 2024 dan tidak boleh adanya agunan bagi kredit UMKM dengan plafon sampai dengan Rp100 juta. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM mengeluarkan Permenko 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Permenko 8 tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan KUR. Peraturan tersebut mengakomodir beberapa hal sebagai berikut:

1. KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dengan nilai plafon pembiayaan/kredit maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan

tambahan. Hanya diperbolehkan adanya agunan pokok berupa usaha yang dibiayai oleh pembiayaan/kredit tersebut.

2. Kesesuaian jumlah pembiayaan/kredit yang diterima sesuai dengan nilai akad yang ditandatangani di semua skema KUR, sehingga tidak diperbolehkan adanya potongan dalam bentuk apapun.
3. Ketentuan komoditas pada KUR khusus diperluas, KUR khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.
4. Ketentuan terkait calon Penerima KUR dapat sedang menerima kredit secara bersamaan diubah menjadi sebagai berikut:
 - a) Calon Penerima KUR dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
 - 1) KUR pada Penyalur KUR yang sama;
 - 2) Kredit kepemilikan rumah;
 - 3) Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
 - 4) Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun;
 - 5) Kartu kredit;
 - 6) Kredit Resi Gudang; dan/atau

- 7) Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan NonBank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
- b) Pemberian kredit secara bersamaan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR;
- c) Pemberian Kredit dapat dilakukan bersamaan didasarkan pada kemampuan membayar calon penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
5. Calon Penerima KUR Kecil dapat ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah kembali menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan 46 Penyalur KUR yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Jumlah penyalur KUR yang meningkat dari masa ke masa menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas akses KUR ke masyarakat. Memperhatikan kebutuhan masyarakat, KUR pada tahun 2021 hadir dengan 5 skema yang terdiri dari:
- a) KUR Super Mikro Merupakan KUR yang diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp10 juta per penerima KUR. KUR Super Mikro ini diprioritaskan untuk dapat disalurkan kepada ibu rumah tangga dan/atau pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berusaha. Berbeda dengan skema KUR lainnya, KUR Super Mikro tidak mensyaratkan minimal lama usaha. Namun demikian, calon penerima KUR Super Mikro yang belum memiliki usaha selama 6 bulan, wajib mengikuti pelatihan atau

pendampingan usaha. Skema KUR Super Mikro yang hadir pada masa pandemi Covid-19 menawarkan fitur yang mudah dan cepat. Dari sisi agunan tambahan, penerima KUR Super Mikro tidak dipersyaratkan agunan tambahan.

- b) KUR Mikro Merupakan skema KUR dengan plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta per penerima KUR. Dalam memperoleh KUR Mikro, penerima KUR tidak diwajibkan agunan tambahan dan tanpa perikatan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah usaha mikro mengakses KUR namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian lembaga penyalur KUR. Bagi penerima KUR Mikro di sektor produksi, plafon KUR Mikro dapat disuplesi kembali tanpa adanya batas maksimal akumulasi plafon KUR. Artinya, usaha mikro di sektor produksi dapat mengakses KUR Mikro kembali setiap kali KUR Mikro sebelumnya telah lunas.
- c) KUR Kecil Merupakan KUR dengan plafon di atas Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta. Pada fase ini, usaha mikro akan didorong untuk mengembangkan usahanya dan bertransformasi menjadi usaha kecil dan menengah. Setelah mengakses KUR Kecil, maka UMKM tersebut dianggap telah dapat secara mandiri mengakses kredit/pembiayaan dengan skema komersial dari lembaga keuangan formal. Sesuai ketentuan terbaru, kredit/pembiayaan dengan plafon maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan.
- d) KUR Khusus Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp500 juta per Penerima KUR. Adapun KUR Khusus ini diberikan kepada penerima KUR yang tergabung dalam suatu kelompok yang memiliki mitra usaha. Skema ini

diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.

- e) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp25 juta per Penerima KUR. Skema ini diberikan dalam rangka pembiayaan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta magang di luar negeri.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan kinerja UMKM, namun hasil yang diperoleh beragam. Secara singkat penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
1	<p><i>Human Capital And Export Performance Of Small And Medium Enterprises In Pakistan</i></p> <p>(Mubarik <i>et al.</i>,2020)</p>	<p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Kinerja <i>Export</i> UMKM di Pakirstan</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>X : <i>Human Capital</i></p>	<p>Modal manusia berpengaruh langsung dan tidak langsung pada Kinerja ekspor.</p>
2	<p><i>The Interconnections Between Bribery, Political Network, Government Supports, and their Consequences on Export Performance of Small and Medium Enterprises in Thailand</i></p>	<p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : <i>Export</i> Kinerja UMKM di Thailand</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Penyuapan</p> <p>X2 : Jaringan Politik</p> <p>X3 : Dukungan Pemerintah</p> <p>X4 : Konsekuensi</p>	<p>Dukungan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Thailand</p> <p>Penyuapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Thailand</p>

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
	(Peerayuth Charoensukmongkol1., 2016)		Jaringan Politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Thailand
3	<i>The interrelationship between SME government support programs, entrepreneurial orientation, and performance: A developing economy perspective</i> (Nakku <i>et al.</i> ,2020)	Variabel Dependen : Y : <i>Export</i> Kinerja UMKM di Uganda Variabel Independen : X1 : Program Dukungan Pemerintah X2 : Orientasi Kewirausahaan	Program Dukungan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Uganda Orientasi Kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Uganda
4	<i>Credit Access, Tax Structure Of Performance In</i>	Variabel Dependen : Y : Kinerja UMKM Manufaktur di Malaysia	Akses kredit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
	<p><i>Malaysian Manufacturing SMES</i></p> <p>(Cheong <i>et al.</i>,2020)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Akses Kredit</p> <p>X2 : Struktur Pajak</p>	<p>Manufaktur di Malaysia</p> <p>Struktur Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM Manufaktur di Malaysia</p>
5	<p><i>Human capital and export performance in the Spanish manufacturing firms</i></p> <p>(Rodríguez <i>et al.</i>,2020)</p>	<p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Perusahaan Manufaktur di Spanyol</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : <i>Human Capittal</i></p> <p>X2 : <i>Kinerja Export</i></p>	<p><i>Human capital</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan manufaktur di Spanyol.</p> <p><i>Kinerja Export</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan manufaktur di Spanyol.</p>
6	<p>Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha</p>	<p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Kinerja UMKM di Kabupaten Boyolali</p>	<p>Insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap</p>

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
	Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Boyolali (Lestari <i>et al.</i> ,2020)	Variabel Independen : X1 : Insentif Pajak X2 : Bantuan Stimulus Pemerintah	Kinerja UMKM di Kabupaten Boyolali Bantuan stimulus pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Boyolali
7	<i>The Differential Effects Of Government Support, Inter-Firm Collaboration And Firm Resources On SME Performance In Adeveloping Economy</i> (Chisanga <i>et al.</i> ,2020)	Variabel Dependen : Y : Kinerja UMKM Dalam Ekonomi Berkembang di Zambia Variabel Independen : X1 : Dukungan Pemerintah X2 : Kerjasama Antar Perusahaan X3 : Sumber Daya	Dukungan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja UMKM Dalam ekonomi berkembang di Zambia Kerjasama Antar Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
			<p>Kinerja UMKM Dalam ekonomi berkembang di Zambia</p> <p>Sumber Daya berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja UMKM Dalam ekonomi berkembang di Zambia</p>
8	<p>Analisis Pengaruh Akses Kredit Terhadap Kinerja Industri Alas Kaki Dari Kulit (Studi Kasus : Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)</p> <p>(Wicaksono,edi 2017)</p>	<p>Variabel Dependen : Y : Kinerja Industri Alas Kaki Dari Kulit</p> <p>Variabel Independen : X1 : Akses Kredit</p>	<p>Akses kredit menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Terhadap Kinerja Industri Alas Kaki Dari Kulit</p>

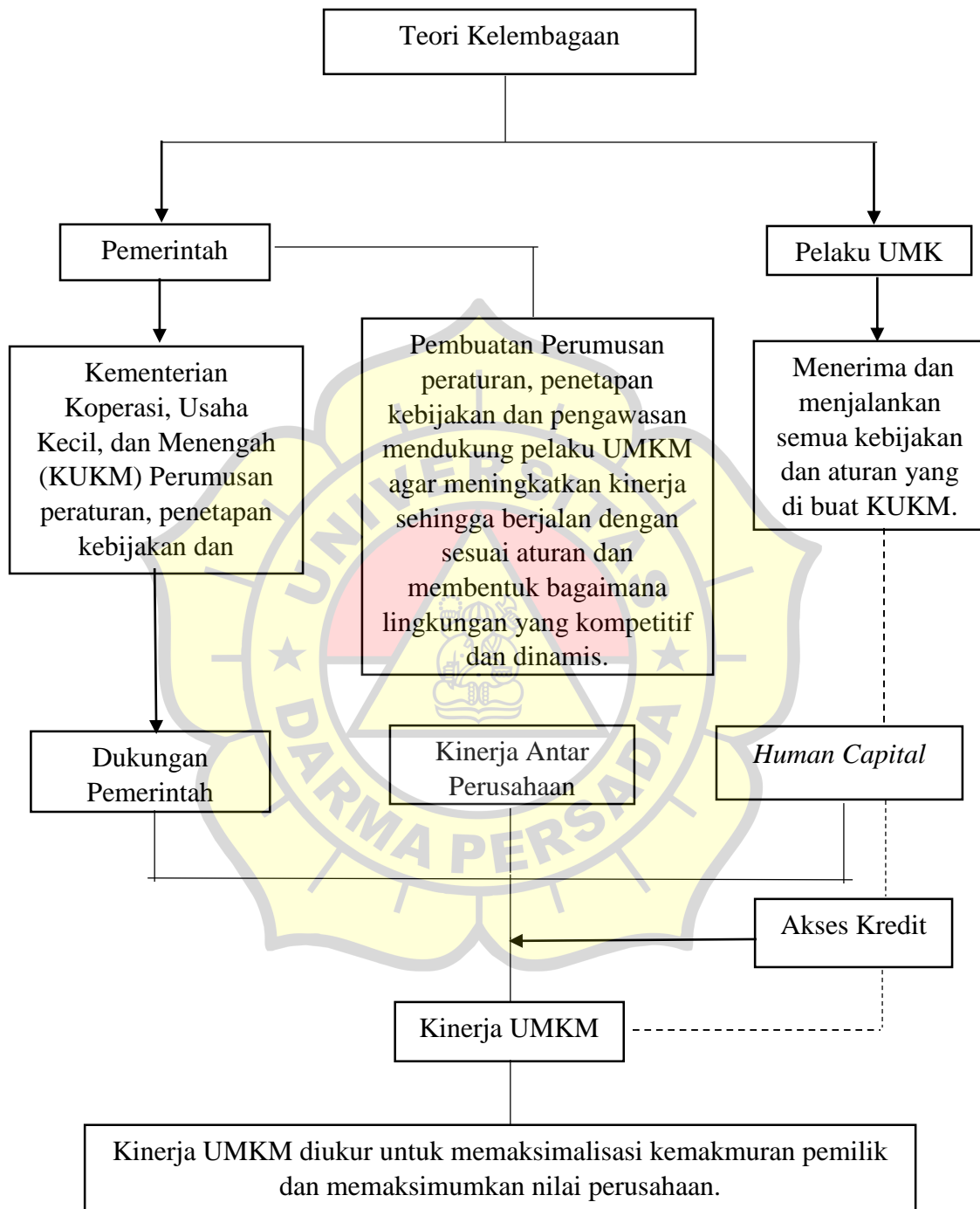
No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
9	<p><i>Effects of government financial incentives On SME Performance In China: evidences from Beijing in the 1990s</i></p> <p>(Guan & Yam.,2015)</p>	<p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Kinerja UMKM di China</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Dukungan pemerintah</p>	<p>Dukungan pemerintah tidak berhubungan secara signifikan dengan kinerja UMKM</p>
10	<p><i>Introduction: Small business and networked innovation: organizational and managerial challenges</i></p> <p>(Colombo <i>et al.</i>,2015)</p>	<p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Kinerja Usaha kecil</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Tantangan organisani dan manajerial</p>	<p>Tantangan organisani dan manajerial dalam memanfaatkan kerjasama antar perusahaan untuk mempertahankan bisnis menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja usaha kecil</p>
11	<p><i>Interactions Among Factors Influencing Product</i></p>	<p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Kinerja UMKM</p>	<p>Orientasi pasar berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja UMKM</p>

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
	<p><i>Innovation and Innovation Behaviour: Market Orientation, Managerial Ties, and Government Support</i></p> <p>(Thongsri & Chang, 2019)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Orientasi Pasar</p> <p>X2 : Ikatan Manajerial</p> <p>X3 : Dukungan Pemerintah</p>	<p>Ikatan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja UMKM</p> <p>Dukungan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja UMKM</p>
12	<p>Pengaruh Kerjasama dan Inovasi Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus : UKM Batik di Yogyakarta)</p> <p>(Akbar, Muhammad 2018)</p>	<p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Kinerja UMKM</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Kerjasama Antar Perusahaan</p> <p>X2 : Inovasi</p>	<p>Kerjasama antar perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM</p> <p>Inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM</p>

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
13	Pengaruh <i>Intellectual Capital (Human Capital, Structural Capital Dan Customer Capital)</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Afni Eliana Saragih 2017)	Variabel Dependen : Y : Kinerja perusahaan Variabel Independen : X1 : <i>Intellectual Capital (Human Capital, Structural Capital Dan Customer Capital)</i>	<i>Human capital (VAHU)</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berdasarkan pada teori kelembagaan untuk lebih memahami penggerak spesifik kelembagaan, organisasi, dan individu dari kinerja UMKM. Strategi bisnis kecil tidak hanya menyoroti kebutuhan untuk pemerintah yang mendukung UMKM tetapi juga perusahaan-perusahaan harus bekerja sama dan menyatukan sumber daya bersama-sama untuk meningkatkan kinerja mereka. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran sebagai berikut :

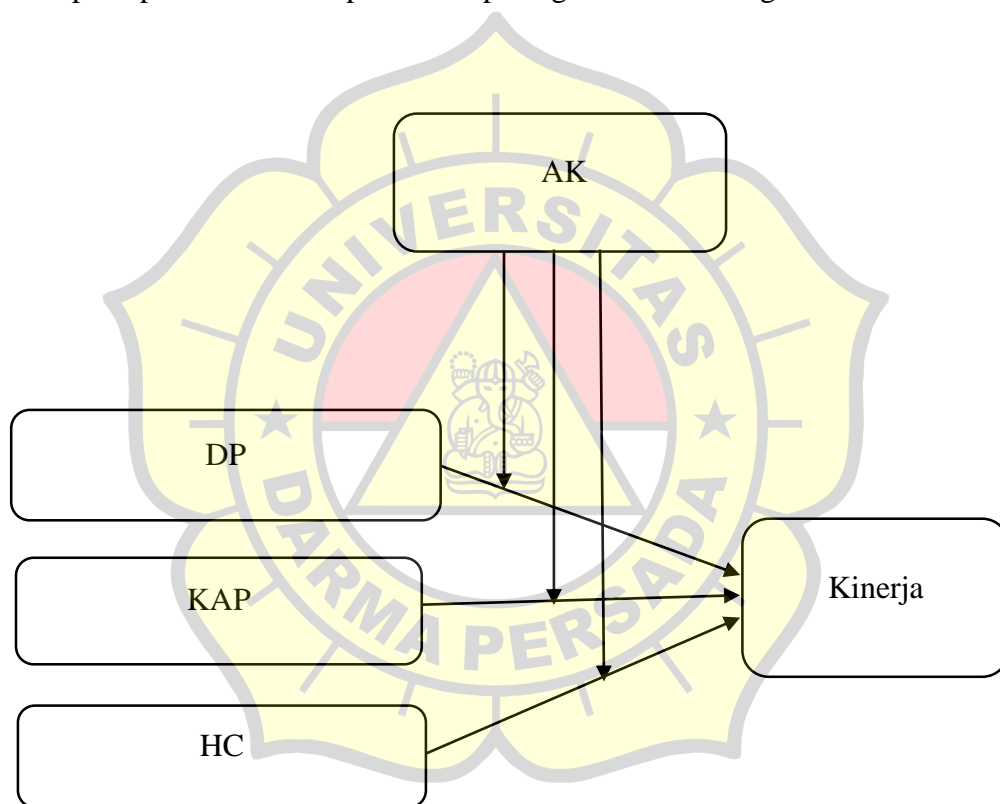


Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Diolah Penulis (2022)

2.9. Hubungan antar Variabel

Model hubungan pengaruh variabel independen dan variabel moderasi pada penelitian ini yaitu Dukungan Pemerintah, Kerjasama antar Perusahaan, *Human Capital* terhadap Kinerja UMKM dan hubungan antara variabel yang dimoderasi Akses Kredit pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut.



Gambar 2.2 Hubungan antar Variabel

Sumber : Data Diolah Penulis (2022)

Keterangan :

Kinerja : Ukuran perusahaan cenderung mempengaruhi kinerja UMKM, sehingga mengukur ukuran perusahaan dengan pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan.

DP : Dukungan kelembagaan dalam penelitian ini mengacu pada persepsi manajer tentang sejauh mana pemerintah dan lembaganya memberikan dukungan untuk kegiatan bisnis mereka, dukungan tersebut meliputi keuangan, teknis, informasi, bahan baku dan peralatan.

KAP : untuk mengukur kerjasama anatar perusahaan, yang didefinisikan sejauh mana perusahaan berkolaborasi dengan pemain pasar lainnya. Responden diminta untuk menunjukkan sejauh mana mereka menghabiskan waktu berkolaborasi dengan pelanggan, pemasok, dan distributor.

HC : Untuk mengukur sumber daya manusia secara lebih komprehensif, ada 6 pengukur ialah pendidikan, pengalaman, pelatihan, sikap, kepatuhan dan stabilitas.

AK : Mengukur akses kredit menggunakan dua variabel sederhana jumlah pinjaman jangka panjang, jumlah yang didukung pemerintah.

2.10 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki 6 hipotesis, yaitu pengaruh dukungan pemerintah terhadap kinerja UMKM, pengaruh kerjasama antar perusahaan terhadap kinerja UMKM, pengaruh *human capital* terhadap kinerja UMKM, akses kredit memoderasi pengaruh dukungan pemerintah terhadap kinerja UMKM, akses kredit memoderasi pengaruh kerjasama antar perusahaan terhadap kinerja UMKM, dan akses kredit memoderasi pengaruh *human capital* terhadap kinerja UMKM. Maka dari itu hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.10.1 Pengaruh Dukungan Pemerintah Terhadap Kinerja UMKM

Kelembagaan pengaturan tentang dukungan pemerintah sehingga memainkan peran penting dalam mempengaruhi UMKM, baik dengan meningkatkan akses ke sumber daya dan membentuk bagaimana UMKM merespons lingkungan yang kompetitif dan dinamis (Tambunan, 2018 ; Lu *et al.*, 2010; Kang & Park, 2012 ; Thongsri & Chang, 2019), Doh & Kim (2014), Tambunan (2018) dan Kang & Park (2012) menemukan hubungan positif signifikan. Penelitian pengaruh dukungan pemerintah terhadap kinerja UMKM (Chisanga *et al.*, 2020) menghasilkan hasil yang positif signifikan artinya, dukungan yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu meningkatkan produktivitas dan modal finansial, dan akan mengarah pada peningkatan kinerja perusahaan. Sejumlah penelitian diantaranya dari Winarti *et al.* (2019) Usaha Kecil Menengah memegang peranan penting dalam menyerap tenaga kerja, menyumbang devisa, maupun menanggulangi kemiskinan sehingga penelitiannya menghasilkan bahwa dukungan pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM. Begitu juga dengan Septiani *et al.* (2019) berhasil membuktikan bahwa pengaruh dukungan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Namun demikian, penelitian Desiyanti (2015) menyatakan pengaruh dukungan pemerintah tidak mempengaruhi signifikan terhadap kinerja UMKM. Hong *et al.* (2016) menghasilkan penelitian bahwa pengaruh dukungan pemerintah dalam bentuk hibah berdampak negatif terhadap inovasi kinerja. Anehnya, Guan & Yam (2015) menemukan hasil bahwa insentif keuangan pemerintah tidak berhubungan secara signifikan dengan kinerja UMKM.

Meskipun hasil penelitian terdahulu tidak sejalan, lingkungan kelembagaan menyatakan bahwa peningkatan dalam dukungan pemerintah untuk berlangsungnya bisnis akan dikaitkan dengan peningkatan kinerja. Logikanya adalah karena lembaga pemerintah mengatur dan memotivasi perilaku para pelaku dalam lingkungan tertentu (Dunning & Lundan, 2018; Scott, 2016), mereka cenderung membentuk sifat kegiatan ekonomi perusahaan yang dapat merangsang tindakan perusahaan dan meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, dukungan kelembagaan seperti yang ditunjukkan oleh dukungan bisnis yang diberikan oleh pemerintah dan lembaganya, seperti tunjangan pajak, pinjaman, teknologi informasi, bantuan peningkatan produktivitas dan modal finansial, akan mengarah pada kinerja perusahaan yang ditingkatkan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Dukungan pemerintah berhubungan positif terhadap kinerja UMKM.

2.10.2 Pengaruh Kerjasama antar Perusahaan terhadap Kinerja UMKM

Hubungan antar perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan terlibat dalam upaya kolaboratif atau kerjasama dengan perusahaan lain, termasuk persaingan, untuk menyatukan sumber daya dan kemampuan mereka dalam upaya mencapai tujuan bersama dan individu (Levy *et al.*, 2003; Gnyawali & Taman, 2009 ; Kang & Park, 2012). Tujuan bersama berhubungan dengan dibangun dan dipegang bersama, sementara tujuan individu bersifat spesifik perusahaan seperti kinerja pasar dan keuangan (Chisanga *et al.*, 2020). Penelitian pengaruh kinerja antar perusahaan terhadap kinerja UMKM yang dilakukan Wang *et al.* (2015) menghasilkan positif signifikan, yang artinya kinerja antar perusahaan mampu menuai berbagai manfaat

seperti pembagian biaya dan risiko, akses ke berbagai keterampilan, pengetahuan, sumber daya dan kemampuan dalam berbagai aktivitas rantai nilai untuk meningkatkan kinerja. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Buana (2018) bahwa pengaruh kerjasama antar perusahaan terhadap kinerja UMKM berpengaruh positif dan signifikan. Begitupula hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan *et al* (2021) yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa UMKM tidak dapat mengambil manfaat dari kerjasama antar perusahaan, beberapa peneliti menghasilkan bahwa kolaborasi mungkin berbahaya bagi kelangsungan hidup UMKM. Misalnya, Gnyawali & Park (2009) menyatakan bahwa kolaborasi antar perusahaan tidak dapat membantu UMKM mendapatkan skala ekonomi, mengurangi ketidakpastian dan risiko pasar, dan mempercepat masuknya produk baru, risiko pencurian teknologi, tantangan manajemen dengan ketidaksesuaian gaya dan hilangnya kontrol dan fokus perusahaan, sehingga dapat merugikan UMKM untuk dapat bekerja sama dengan pesaing. Colombo *et al.* (2015) juga menghasilkan penelitian bahwa kolaborasi dengan perusahaan lain menimbulkan banyak tantangan organisasi dan manajerial untuk UMKM seperti mengalihkan sumber daya yang terbatas dan waktu manajemen dari bisnis inti perusahaan.

Meskipun ada ketidak sejalanannya dalam penelitian tentang apakah pengaruh kerjasama antar perusahaan meningkatkan atau merusak kinerja, Teori RBV menyarankan hubungan dengan perusahaan lain sebagai sumber daya yang unik, langka dan tak ada bandingannya, dan bahwa perusahaan yang bekerja sama dengan

perusahaan lain lebih mungkin untuk mendapatkan persaingan yang berkelanjutan posisi dan kinerja yang unggul daripada pesaing yang mempraktikkan kolaborasi terbatas (Chisanga *et al.*, 2020). Sehingga hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kerjasama antar perusahaan berhubungan positif dengan kinerja UMKM

2.10.3 Pengaruh *Human Capital* terhadap Kinerja UMKM

Sumber daya manusia adalah fondasi keunggulan kompetitif. Argumen teoretisnya adalah sumber daya yang berharga, langka, tak ada bandingannya dan tidak dapat diganti (VRIN), mendorong perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Singkatnya, sumber daya manusia dapat menjadi salah satu sumber daya untuk diperoleh perusahaan keunggulan kompetitif. Secara khusus, pemilihan sumber daya manusia (persyaratan pendidikan dan penyaringan), pengembangan melalui pelatihan dan penerapan, meningkat secara signifikan *learning-by-doing*, yang pada hakikatnya meningkatkan kinerja perusahaan. Modal manusia memberikan gambaran yang jelas (McDowell *et al.*, 2018 ; Jain *et al.*, 2017). Bahkan mengidentifikasi bahwa pelatihan dan mempertahankan bakat yang nyata telah menjadi isu penting untuk sumber daya manusia di seluruh dunia.

Menurut Kottaridi *et al.* . (2019), modal manusia pada dasarnya adalah pengetahuan karyawan, keterampilan dan kemampuan. AlQershi *et al.* ,(2018) melakukan penelitian tentang pengaruh *human capital* terhadap kinerja perusahaan yang menghasilkan positif dan signifikan Artinya, modal manusia memiliki peran penting dalam hubungan kinerja UMKM, bahwa perusahaan dengan tingkat sumber

daya manusia yang lebih tinggi dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Hasil tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjahjadi *et al.* (2020) sumber daya manusia atau *human capital* memiliki efek langsung dan positif terhadap kinerja UMKM. Rodríguez *et al.* (2020) juga melakukan penelitian pengaruh human capital terhadap kinerja UMKM yang menghasilkan positif dan signifikan. Dengan demikian, hubungan antara modal manusia (pengalaman) dan belajar (belajar menciptakan sumber daya manusia yang spesifik *tacit knowledge*), yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Teori yang berkaitan dengan kinerja adalah *human capital* memiliki pengaruh yang signifikan & penting bagi perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Mubarik *et al.*, 2020).

Memon *et al* (2019) meneliti hal yang sama bahwa di Pakistan, pelatihan formal apapun dan pendidikan dasar tidak dianggap penting saat memulai bisnis. Itu pentingnya pelatihan juga terselubung saat mempekerjakan karyawan untuk bisnis tersebut. Sebanyak UKM di Pakistan tidak memiliki sistem perekrutan dan seleksi yang tepat untuk diperoleh dan mengembangkan campuran sumber daya manusia yang tepat, mereka tetap tidak mampu untuk bekerja dengan baik. Perusahaan yang fokus pada sumber daya manusia untuk mengembangkan kapasitas akan menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yang kemudian meningkatkan kapasitas mereka untuk lebih menyerap transfer teknologi dan menginternasionalkan perusahaan. Sehingga hipotesis sebagai berikut :

H3: Modal manusia berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM

2.10.4 Akses Kredit memoderasi Pengaruh Dukungan Pemerintah terhadap Kinerja UMKM

Akibat ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada bulan Maret 2020, menjadi suatu tantangan tersendiri untuk UMKM. Jika kondisi ini tidak diantisipasi akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Bawa & Basu, 2019). Karena struktur permodalan UMKM, ada ketergantungan yang lebih besar pada peningkatan modal dari sumber eksternal (Berger & Udell, 2006). Hal ini berimplikasi bahwa kinerja usaha dapat digunakan untuk memprediksi akses kepada pinjaman (Kiboki *et al.*, 2014). Penelitian Talaulikar & Desai (2015) menyatakan bahwa sebagian besar UMKM (92,77%) tidak memiliki akses pembiayaan eksternal atau membiayai usahanya dengan modal sendiri dikarenakan lembaga keuangan memandang UMKM berisiko dalam pemberian kredit.

Dukungan pemerintah terhadap para pelaku UMKM selama masa pandemi Covid-19, terbagi menjadi 3 golongan kebijakan yaitu, pemberian kredit modal kerja, melakukan restrukturisasi kredit UMKM, serta pemberian berbagai bentuk dukungan lain guna membantu UMKM yang terdampak. Berbagai dukungan ini dilaksanakan oleh pemerintah, bekerja sama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta BI (Bank Indonesia). Kelembagaan mengatur dalam hal dukungan pemerintah serta memainkan peran penting dalam mempengaruhi UMKM ,perilaku baik dengan meningkatkan akses ke sumber daya dan membentuk bagaimana UKM merespons

lingkungan yang kompetitif dan dinamis (Thongsri & Chang, 2019). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :

H4 : Akses kredit memoderasi pengaruh dukungan pemerintah terhadap Kinerja UMKM.

2.10.5 Akses Kredit memoderasi Pengaruh Kerjasama antar Perusahaan terhadap Kinerja UMKM

Akses kredit di masa pandemi merupakan salah satu program pemerintah untuk dapat membantu pelaku UMKM untuk dapat bangkit di tengah pandemi. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Dampak terhadap kinerja akan memengaruhi ketahanan permodalan. Melalui permodalan dengan kredit cenderung membentuk sifat kegiatan ekonomi perusahaan sejauh mereka dapat merangsang tindakan perusahaan dan meningkatkan kinerja. Wang *et al.* (2015) melakukan penelitian tentang kinerja antar perusahaan terhadap kinerja UMKM, hasilnya mampu menuai berbagai manfaat seperti pembagian biaya dan risiko, akses ke berbagai keterampilan, pengetahuan, sumber daya dan kemampuan dalam berbagai aktivitas rantai nilai untuk meningkatkan kinerja. Mempunyai tujuan bersama di mana sebuah hubungan dibangun dan dipegang bersama sementara tujuan individu bersifat spesifik dengan perusahaan, seperti kinerja pasar dan keuangan (Gnyawali & Park, 2009). Sehingga para pelaku UMKM bekerja sama untuk bangkit di masa pandemi dengan saling bahu – membahu satu dengan yang lain. Dan dikarenakan kredit yang seharusnya sudah jatuh tempo pada tahun ini, debitur dapat menunda pembayarannya

sehingga mereka dapat menggunakan modalnya untuk bertahan di masa pandemi.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :

H5 : Akses kredit memoderasi pengaruh kerjasama antar perusahaan terhadap Kinerja UMKM.

2.10.6 Akses Kredit memoderasi Pengaruh *Human Capital* terhadap Kinerja UMKM

Hampir seluruh sektor ekonomi terdampak Covid-19, termasuk sektor UMKM yang sebagian pelaku tidak memiliki banyak modal dan sebagian modal merupakan aset pribadi. UMKM berkontribusi hampir 40% terhadap PDB nasional (Chong, 2019), mempelajari efektivitas inisiatif kredit di negara tersebut sehingga memunculkan kebijakan yang ditargetkan yang mendukung peran penting UMKM dalam mendorong pertumbuhan dan inovasi di dalam negeri. Bantuan kredit juga dapat menghasilkan keuntungan yang cukup pada tahap awal operasi untuk tetap mandiri dalam jangka panjang (Braun *et al.* , 2015). Namun demikian dimasa pandemi , sebagian besar studi mempertimbangkan *human capital* sebagai konstruksi tunggal, dengan hanya mempertimbangkan dimensi spesifik dari modal manusia. Elemen yang berbeda dari sumber daya manusia mungkin memang relatif lebih penting untuk aspek kinerja perusahaan.

Penekanan penelitian pada kinerja perusahaan penting sebagai mayoritas UMKM yang berjuang untuk mencapai pertumbuhan dan kelangsungan hidup (Okpara & Okpara,2011). Perusahaan yang fokus pada sumber daya manusia untuk mengembangkannya kapasitas akan menghasilkan keunggulan kompetitif yang

berkelanjutan, yang kemudian meningkatkan kapasitas mereka untuk lebih menyerap transfer teknologi. Para pelaku UMKM memanfaatkan sistem kredit untuk dapat menambah modal terhadap *human capital*, dimana untuk saat ini merupakan salah satu aset yang penting bagi perusahaan. Hatch & Dyer (2016) menambahkan bahwa sumber daya manusia yang spesifik merupakan investasi penting bagi kinerja perusahaan. Seleksi, pelatihan dan penyebaran secara efektif menambah proses belajar. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa seringnya berganti karyawan dapat mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan kapabilitas sumber daya manusia yang kuat dapat memanfaatkan sumber daya secara efisien, dengan menimbulkan biaya minimal untuk pengerjaan ulang, perbaikan dan pemborosan material (Texiera, 2014). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :

H6 : Akses kredit memoderasi pengaruh *human capital* terhadap Kinerja UMKM.